

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Chomzah, A. A. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. *Prestasi Pustaka, Jakarta*.
- Djafar Saidi, M., & SH, D. (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak*. *Jakarta. Rajawali Pers*
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, Surabaya: Arco
- Keumala, Dinda dan Setiyono. 2009. *Tanah dan Bangunan*. Jakarta : Redaksi Raih ASA Sukses.
- Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan edisi terbaru*. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Oryza Dyara Radhite, 2022, *Pedoman Lengkap Mengurus Perizinan Tanah dan Rumah*, Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran tanah di Indonesia:(berdasarkan PP 24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*. Mandar Maju.

Sangsun, F. S. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah: Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Jenis-Jenis Sertifikat Tanah, Proses Pendaftaran Tanah*, cetakan ke (Jakarta: Visimedia)

Setiawan, A. (2022), *Hukum Pertanahan Nasional: Sejarah dan Politik Hukum Pertanahan, Hak Menguasai Negara, Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta:Laksbang Pustaka

Soeprato. R. 1968. *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*. Jakarta. CV Mira Sari.

Soetomo. 1978. *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT*. Bandung,Alumni.

Urip Santoso, S. H. (2015). *Perolehan hak atas tanah*. Prenada Media.

Urip Santoso, S. H. (2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Prenada Media.

## **UNDANG-UNDANG**

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Serta Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 29 Tahun 2016

Peraturan Menteri No. 6 Th. 2018-Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL)(1)-

1

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan  
Pertanahan Nasional

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pemerintah dalam  
penyelenggaraan penataan ruang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah  
pusat dan pemerintahan daerah

## **JURNAL**

Alfaruq, M. A. (2022). *PENSERTIFIKATAN TANAH DENGAN BUKTI C DESA DI  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL* (Doctoral dissertation,  
Universitas Islam Sultan Agung).

Alfons, A. (2021). Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena  
Cacat Administrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 277-288.

- Andari, A. L. P., Hasanah, M., & Sumriyah, S. (2023). Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 187-198.
- Anjarsari, S. (2019). *PENETAPAN TANDA BATAS HAK ATAS TANAH LETTER C/D AKIBAT LONGSOR DI PURWOREJO* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Ardani, M. N. (2019). Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Gema Keadilan*, 6(1), 45-62
- ARIFIN, M. (2019). *Kekuatan Pembuktian Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Berdasarkan Undang Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (Analisis Putusan Nomor 23/Pdt. G/2017/PNPbl)* (Doctoral dissertation, IAIN Jember).
- Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peran BPN dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pertanahan
- Fadhlurrohman, M. D. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Dompu.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Hermanto, B., & Rasmini, M. (2019). Analisis potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu pajak daerah. *AdBispreneur: Jurnal*

*Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(3), 273-281.

Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31. Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peran BPN dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pertanahan

Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al-‘Adl Vol*, 11(2).

Iqbaal, M. (2020). *Kekuatan Hukum Letter C sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Kasus di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Julianti, R. (2021). *Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Layli, D. A. (2020). *Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).

Lestari, I., & Rosmidah, R. (2023). Mekanisme Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Recital Review*, 5(1), 174-193.

Megawati, D. P. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 311-325.

- Muhammad, Y. F. W., Haryanto, H., & Ahmad, D. N. F. (2022). Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*, 2(1), 49-68.
- Mujiburrohman, D. A. (2018). Menyoal Penafsiran Tanah Telantar. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 1-22.
- Natadiarta, I. H., Sa'adah, N., & Lumbanraja, A. D. Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali. *Notarius*, 13(2), 504-515.
- Nurhayati, N., Rizka, R., Bangsawan, M. I., & Trinh, M. L. (2023). LEGAL SECURITY OF OWNERSHIP OF LAND CERTIFICATES POST EXCHANGING FOREST AREA FOR RESIDENTS RELOCATION IN NGROTO DUSUN, WONOGIRI, CENTRAL JAVA. *Khairun Law Journal*, 7(1), 8-17.
- Prayogatama, A. (2021). *PROSES PELAKSANAAN KONVERSI TANAH LETTER C MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK DI KOTA SURAKARTA (Studi Kasus di Kelurahan Jebres dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Prihandini, N. A., Supriyadi, S., & Arifin, Z. (2022). Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati. *Semarang Law Review*, 2, 190-202.

- Putra, V. B. W., & Priyadi, B. P. (2019). Analysis of low performance of the Bekasi City land agency in land certification services. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 70-87.
- Rachma, Y. (2019). Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 519-529.
- Radjijo, R. (2007). Pemungutan Pajak Penghasilan dengan Sistem Self Assesment Bagi Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7(1), 23374.
- Sadjarwo, I. H. H. (2020). Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Notaire*, 3, 107.
- Saena, H. G. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017.
- Sagala, E., & Nasution, A. P. (2019). Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Di Tinjau Dari Nilai Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 52-63.
- Sitohang, E., & Siambaton, T. (2021). Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 61-68.

SUGITO, S. R. A. B. (2021). PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Suharto, B., & Supadno, S. (2023). Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1).

Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208-223.

## **INTERNET**

Ditjenpptr.atrbpn.go.id. PETUNJUK TEKNIS IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN HAK ATAS TANAH YANG TELAH BERAKHIR JANGKA WAKTU, <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/ec0184b25bb730bf93fec79f4f96b925.pdf>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2019). Panduan Pendaftaran Tanah. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021). Peta Jalan  
Reforma Agraria dan Tata Ruang Indonesia 2020-2045. Jakarta:  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kot-pekanbaru.atrbpn.go.id. <https://kot-pekanbaru.atrbpn.go.id/cari-layanan> diakses  
pada tanggal 24 Juli 2024 Pukul 22.50

Online-pajak.com. [https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-  
pemungutan-pajak](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak)

Rumah.com <https://www.rumah.com/panduan-properti/letter-c-tanah-74192> pukul  
[21.47](#)

Tataruang Atrbpn.go.id, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Tab/Index/8> diakses Selasa, 25  
Juli 2023, 20.02 WIB,

Tataruang.atrbpn.go.id. <https://tataruang.atrbpn.go.id/Posts/Index/1> Pukul 14.34  
tanggal 2 Juli 2023